IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA KANTOR KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Pengajuan Skripsi
Program Studi Administrasi Publik

Oleh:

RAJI GUSTANI
NPM: 2023426

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama	: Raji Gustani
NPM	: 2023426
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA KANTOR KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 21 Oktober 2026

Mengetahui,
Kaprodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Arif Budiman, S.Sos., M.A.P.
NUPTK. 7950765666130302

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah, Penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PADA KANTOR KECAMATAN BENUA LIMA KABUPATEN BARITO TIMUR.**

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skkipsi ini, terutama:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR., selaku Ketua STIA Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., MA selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos., M.AP., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan;
4. Ibu Eka Santi Agustina, S.Sos.,M.M.,CIAQaR, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan;
5. Bapak Mahadani, S.AP, MM., Camat Benua Lima yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mau berpartisipasi memberikan informasi.
6. Ibu Wanrawaty, S.Pd, M.AP., Sekretaris Camat Benua Lima yang dan mau berpartisipasi memberikan informasi kepada peneliti.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

8. Seluruh pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Benua Lima, terutama yang memberikan data serta informasinya kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini belum sempurna, Penulis berharap semoga Dosen pembimbing I dan II dapat memberikan sebaik mungkin dalam penyelesaian proposasl ini. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Benua Lima, 21 Oktober 2026

Penulis

Raji Gustani

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
BAB II LANDASAN TEORI **10**
A. Hasil Penelitian Terdahulu 10
B. Tinjauan Teoritis 12
1. Kebijakan Publik 12
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik 13
3. Proses Kebijakan 14
4. Tujuan Kebijakan 15
5. Tahap-Tahap Kebijakan 16
6. Implementasi Kebijakan Publik 17
7. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .. 20
8. Sistem Informasi Pembangunan/ Pemerintahan Daerah (SIPD) 21
C. Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Lokasi Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian 30
C. Tipe Penelitian 31
D. Sumber Data 32
1. Data 32
2. Sumber Data 32
E. Desain Operasional Penelitian 34
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Analisa Data 36
H. Uji Kredibilitas Data 37
DAFTAR PUSTAKA **39**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 32
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..... 33

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran 28

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan peri-kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus-menerus, berdasarkan kemampuan Negara dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Untuk mewujudkan pembangunan nasional agar berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang matang dengan melihat kedepan dalam mengambil pilihan berbagai alternatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan yang lebih baik. Dalam proses pembangunan nasional, Indonesia menganut sistem kebijakan desentralisasi dengan asas otonomi daerah. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk menetapkan kebijakan (kewenangan politik) dan melaksanakan kebijakan (kewenangan administrasi), berdasarkan *local voice dan local choice*. Penyerahan kewenangan tersebut berimplikasi pada perencanaan pembangunan di daerah. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri, serta membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai

STIA AMUNTAI

semangat mewujudkan daerah yang lebih mandiri, baik mandiri secara politik maupum finansial. Pemberian kewenangan ini diharap mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya serta memiliki semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila target atau sasaran tujuan telah sesuai dengan yang direncanakan. Perencanaan merupakan sebuah langkah dalam menyusun dokumen perencanaan agar dapat meminimalisir adanya kejanggalan atau kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan, yang tentunya langkah-langkah atau prosedur perencanaan harus dilakukan dengan tepat. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, Teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau tekhnik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, Makmur, dan sejahtera.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan prins*ip good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu implementasi penting di Indonesia adalah pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diinisiasi oleh

Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara digital.

Perubahan sistem pemerintahan dari terpusat menjadi otonomi telah mendorong perlunya sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Permendagri No. 70 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pengganti Permendagri No. 8 Tahun 2014, menandai transformasi besar dalam pengelolaan informasi pemerintahan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD menjadi sistem terintegrasi yang mengelola seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efisiensi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun dan mengelola data pembangunan secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh tingkat usability atau kemudahan penggunaan sistem oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sulitnya Pemerintah Pusat dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan Daerah secara nasional karena belum

optimalnya penggunaan sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi serta fakta bahwa data base pemerintah daerah masih bersifat lokal dan belum terkoneksi dengan pemerintah pusat menjadi alasan Kementerian Dalam Negeri melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pengembangan Aplikasi SIPD ini merupakan perwujudan kebijakan Kementerian Dalam Negeri menuju satu data satu sistem dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk digunakan secara efektif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya satu sistem yang terhubung diharapkan memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat sehingga informasi menjadi lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik melalui situs jaringan resmi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola melaui Aplikasi SIPD. Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Di Kabupaten Barito Timur khususnya pada Kecamatan Benua Lima, SIPD baru diterapkan beberapa tahun yang lalu sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi pusat. Penerapan sistem ini telah mendukung penyusunan dokumen anggaran seperti RKA, RKPD, dan RAPBD secara digital. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan fitur pelaporan, gangguan teknis sistem, hingga keterlambatan input data dari OPD. Kondisi ini berdampak pada proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, sehingga beberapa laporan keuangan masih disusun secara manual. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai daerah juga menghadapi tantangan serupa dalam penerapan SIPD, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia.

Permasalahan yang didapati terakait SIPD diantaranya sistem error, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman pelaksana terhadap sistem. Namun, penelitian ini berbeda karena mengimplementasi SIPD secara komprehensif dari seluruh tahapan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Timur, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan observasi peneliti dimana permasalahan yang ada pada Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima adalah:

1. Pemaksaan penggunaan sistem yang belum matang secara infrastruktur maupun fitur menjadi kendala sistemik yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah, termasuk di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur. Ketika aplikasi keuangan yang belum siap

dipaksakan untuk berjalan, dampak langsungnya dirasakan pada rantai birokrasi terbawah seperti keterlambatan pencairan dan beban administrasi ganda. *(Sumber : observasi awal peneliti)*

2. Kurangnya sosialisasi tentang SIPD dan Keterbatasan dalam pelatihan teknis, serta persepsi bahwa sistem kurang efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas harian. Kurangnya sosialisasi menyebabkan aparatur di kecamatan tidak memahami urgensi, fungsi menyeluruh, maupun regulasi terbaru mengenai transisi atau pemutakhiran platform SIPD, serta Keterbatasan Pelatihan Teknis membuat operator atau staf pengelola di kecamatan gagap saat mengoperasikan sistem, DIKETHUI sosialisasi dan pelatihan hanya dilakukan 3 kali yakni pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Hal ini memicu tingginya risiko galat (*error*) dalam penginputan data perencanaan dan anggaran. Aparatur di tingkat kecamatan umumnya terlambat mendapatkan pelatihan (bimbingan teknis) yang memadai dibandingkan aparatur di tingkat Kabupaten (BPKAD/Bappeda). *(Sumber : observasi awal peneliti)*
3. Sulitnya akses aplikasi dikarenakan lambannya sistem sehingga mengakibatkan ketidak efisienan waktu pada proses penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Koneksi internet yang tidak stabil atau kurang memadai di tingkat kecamatan memperparah hambatan saat harus mengunggah atau mengunduh data anggaran yang berukuran besar. *(Sumber : observasi awal peneliti)*

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "**Implementasi Sistem Informasi**

Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur"

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Kantor Kecamatan Benua Lima**.** George C. Edwards III dalam Igirisa (2022: 66-68 implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan Berdasarkan hasil dari penelitian serta memberikan konstribusi bagi pemegang ilmu manajemen, khususya dalam manajemen publik.
   b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupaun mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur
   c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pengkaji ilmu kebijakan yang lain.
2. Manfaat Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan menjadi bahan masukan maupun sebagai sumber informasi dalam pengkajian kebijakan publik.
   b. Bagi Pemerintah diharapakan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan Penerapan

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Lenny Mariana (2024).** Dengan judul "Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi" dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terkait dengan penerapan aplikasi SIPD, serta melalui analisis dokumen dan observasi langsung. Analisis penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menentukan keberhasilan suatu implementasi dengan mempertimbangkan factor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*disposition*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Pengembangan SIPD merupakan perwujudan dari amanat Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk digunakan secara efektif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Bekasi masih memliki beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hambatan dalam penerapan SIPD yang faktor komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan

sumber daya manusia yang terampil karena Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi serta masalah teknis dalam seperti aplikasi yang sulit untuk di akses karena permasalahan jaringan, infrastruktur, serta fitur menu pada aplikasi yang belum lengkap juga menjadi salah satu kendala. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan Sistem informasi di pemerintahan daerah.

2. **Devi Novita Sari. (2022).** "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur". Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan berdasar pada data primer maupun sekunder dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, yang dianalisis hingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Temuan dari penelitian ini yaitu implementasi SIPD belum berhasil sepenuhnya, karena hanya memenuhi dua indikator dari total empat indikator keberhasilan yang ada. Meskipun demikian, sebagai kebijakan baru tentunya Bappeda sudah cukup optimal dalam implementasinya dan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya saat ini adalah lokasi penelitian dan teori yang akan diguanakan dalam penelitian, persamaannya adalah berkaitan dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan menggunakan metode penelitain kualitatif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Rose dalam Darnus (2021:91) mengartikan kebijakan publik (*policy*) lebih sebagai suatu panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

Anderson dalam Darnus (2021:91) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternative yang ada.

Sedangkan Harold D. Laswell dalam Taufiqurokhman (2023:5) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan (policy) adalah proyek, nilai, dan praktik. Mirip dengan pendapat Laswell dan Kaplan, Caarl Freidrich mengingatkan pentingnya konsep kebijakan memiliki sasaran, tujuan, dan objek tertentu yang jelas.

David Easton dalam (Wirata 2022:23) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan publik yang dikembangkan oleh baan usaha atau pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.

Menurut Taufiqurokhman (2023:5) Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public);
b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan;
d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

a. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
c. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
d. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
e. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

Anderson dalam Prabawati (2020:2-3) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik yaitu sebagai :

1) Setiap kebijakan mesti ada tujuannya artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena ada kesempatan membuatnya.
2) Suatu kebijakan tidak boleh berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegak hukum.

3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.
4) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5) Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya.

3. Proses Kebijakan

Menurut Dunn dalam Igirisa (2022:37) dalam Proses kebijakan publik adalah aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual

Winarno dalam Wirata (2022:14-15) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya

dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
d. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksana- kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
e. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

4. Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

1) Memelihara ketertiban umum (sebagai stabilisator).
2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
3) Memadukan sebagai aktivis (negara sebagai koordinator).
4) Menunjuk dan membagi benda *material* dan *non material* (negara sebagai distributor).

Menurut Nugroho dalam (Margareth 2024:5), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll dalam Margareth (2024:5), menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

5. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut M. Irfan Islamy dalam Marwiyah (2022:38) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahapan yaitu :

a. *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
b. *Non self-execiting*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ripley dalam Prabawati (2020:6) membedakan dalam empat tahapan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) form*ulation and legitimating of goal and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact*, (d) *decision about the future of the policy and program*.

Menurut Thomas R. Dye dalam Prabawati (2020:6-7) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*) Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
b. Penyusunan agenda (*agenda setting*) Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat

publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
d. Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*) Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses kebijakan sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan di evaluasi.

6. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

Menurut Grindle, implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Kusuma (2022:120)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle, dalam dalam Igirisa (2022:69-70) dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan

(*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target groups;
3) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4) Ketepatan letak sebuah program;
5) Sebuah kebijakan menyebutkan aparat pelaksananya dengan rinci, dan
6) Sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier dalam Marwiyah (2022:41) *A Framework for Policy Impementation Analysis.* Menurut kedua ahli ini tentang kebijakan berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-varibel yang dimaksud yaitu:

a. Mudah atau tidaknya masalah kebijakan publik yang akan dibuat
b. Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dikehendaki
c. Kemampuan kebijakan secara terstruktur perlu proses implementasi secara tepat
d. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Leo Agustino 2022:83-84) Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

a. Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisir.
b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.
c. Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
d. Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
f. Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan menagarah suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

7. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan adalah: adalah kondisi sosial ekonomi, perhatian prs terhadap masalah kebijakan, dukungan kewenangan. Sedangkan daya dukung peraturan yang mempengaruhi proses implementasi adalah teori: teori kausal yang memadai, sumber kejelasan/konsistensi tujuan, kewenangan yang mencukupi, integrasi organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekruitmen dari pejabat pelaksana dan akses formal pelaksana ke organisasi.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III dalam Igirisa (2022:66-68 implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

a. Komunikasi
b. Sumber daya
c. Disposisi
d. Struktur birokrasi

Model pendekatan implementasi di atas, yang dikemukan oleh George Edward III merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel dan secara berkesinambungan atau berhubungan. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edward III, ada empat faktor atau variabel penentu yaitu:

1. "*Communications*, mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.
2. *Resouces*, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.
3. *Dispositions*, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan dilaksanakan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.
4. *Bureaucratic Structure*, mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertangung jawaban di antara unit organisasi". (George Edward III).

8. Sistem Informasi Pembangunan/ Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara online dan terintegrasi. SIPD-RI diatur oleh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada 27 September 2019**.**

a. Fungsi Utama SIPD
    1) Perencanaan Daerah: Membantu menyusun program pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
    2) Pengelolaan Keuangan: Mengatur anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah.
    3) Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan penggunaan anggaran daerah dapat diawasi dengan data yang akurat dan terbuka.
    4) Integrasi Nasional: Menghubungkan data keuangan dan pembangunan daerah langsung dengan sistem pemerintah pusat.
b. Panduan umum pengisian SIPD berdasarkan jenis kegiatan:
    1) Cara Login Awal
        a) Buka *browser* (Chrome atau Mozilla) dan akses laman SIPD Kemendagri.
        b) Pilih Provinsi atau Kabupaten/Kota tempat Anda bertugas pada peta/pilihan wilayah.
        c) Masukkan *Username, Password*, dan kode *Captcha* yang tersedia, lalu klik Masuk.
        d) Pilih Tahun Anggaran yang sesuai, lalu klik Login/Masuk.
    2) Cara Input Usulan Masyarakat (Musrenbang / Desa / Kelurahan)
        a) Masuk ke menu Usulan, lalu pilih Usulan Aspirasi.
        b) Klik Tambah Usulan.

c) Pilih tujuan usulan (Kabupaten/Kota atau Provinsi) dan pilih Kamus Usulan yang sesuai.

d) Ketik uraian permasalahan dan lengkapi alamat lokasi beserta titik koordinat peta jika ada.

e) Unggah berkas pendukung seperti proposal (PDF max 2 MB) dan foto lokasi (JPG), lalu klik Simpan.

f) Centang usulan yang sudah benar, lalu klik Ajukan.

3) Cara Input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

a) Pilih menu Penganggaran, lalu pilih Sub Kegiatan Belanja.

b) Pilih subkegiatan yang akan diisi, lalu klik Lihat Rincian Belanja.

c) Klik tombol Tambah.

d) Isi detail belanja seperti objek belanja, kode rekening (sesuai Standar Harga Satuan / SSH/SBU), sumber dana, koefisien, dan volume.

e) Periksa kembali data yang dimasukkan, lalu klik Simpan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bagian Kesatu Informasi Perencanaan Anggaran Daerah Pasal 17:

(1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a. informasi perencanaan anggaran daerah;

c. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;

d. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

f. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;

g. informasi barang milik daerah; dan

h. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD.

Kemudian Pasal 18:

(2) Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.

(3) Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Penyusunan KUA dan PPAS;
b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
c. Kerja perangkat daerah;
d. Penyusunan rancangan APBD; dan
e. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
f. Satuan kerja perangkat daerah

Bagian Kedua tentang Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 19:

(1) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.

(2) Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

STIA AMUNTAI

b. Pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;

c. Pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;

d. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;

e. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan

f. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Bagian Ketiga, Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pasal 20:

(1) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.

(2) Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas;

e. neraca;

f. laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Keempat Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah pada Pasal 21:

(1) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dihasilkan dari

STIA AMUNTAI

proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik.

(2) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan

b. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

Bagian Kelima Informasi Barang Milik Daerah pada Pasal 22:

(1) Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.

(2) Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penilaian;

g. pemindahtanganan;

h. pemusnahan;

i. penghapusan; dan

j. penatausahaan.

STIA AMUNTAI

k. Bagian Keenam

Informasi Keuangan Daerah Lainnya Pasal 23:

(1) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.

(2) Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Perubahan sistem pemerintahan dari terpusat menjadi otonomi telah mendorong perlunya sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Permendagri No. 70 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pengganti Permendagri No. 8 Tahun 2014, menandai transformasi besar dalam pengelolaan informasi pemerintahan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD menjadi sistem terintegrasi yang mengelola seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efisiensi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Sistem informasi pembangunan di kecamatan Benua Lima sudah melakukan upaya untuk penyesuaian dalam penggunaan SIPD namun masih ditemukan kendala yang menghambat penerapannya dari Sumberdaya manusianya, peralatan dan penggunaan aplikasi yang masih dianggap rumit. Kemudian dikaitkan denan Teori George C.Edwards III dalam Igirisa (2022:66-

68 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

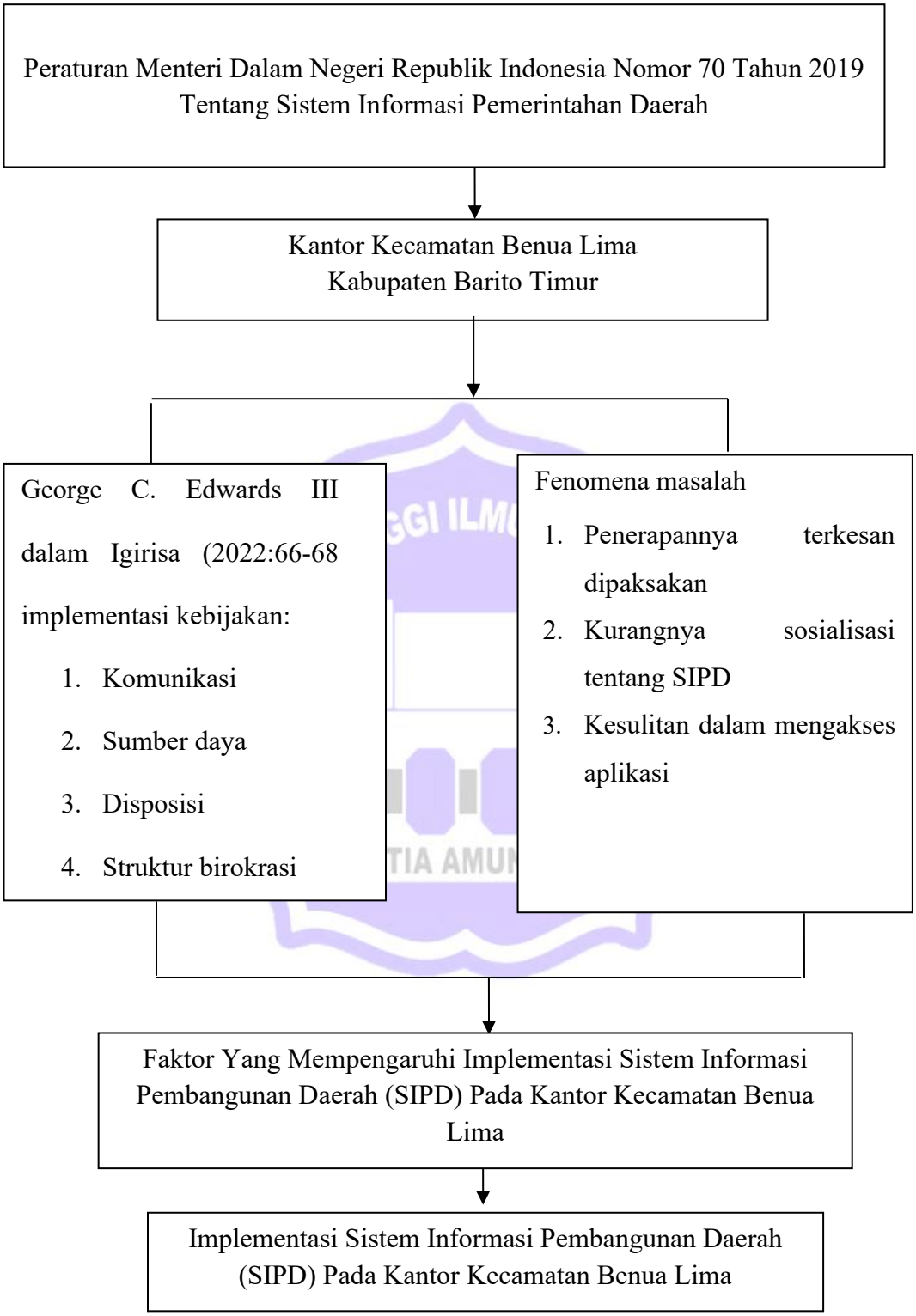

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur yang beralamat di Jl. A. Yani RT. 02 No. 89 (atau Jl. A. Yani Km. 14), Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73661.

B. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mendalam dalam memahami fenomena manusia dan masyarakat melalui analisis terhadap data non-numerik. Dengan menekankan pada aspek *deskriptif* dan *interpretatif*, segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha untuk menggambarkan, memaparkan, atau melukiskan suatu objek, fenomena, data, atau keadaan apa adanya secara objektif, sistematis, dan terperinci tanpa melakukan manipulasi. Aspek interpretatif merujuk pada elemen, sudut pandang, atau dimensi yang berkaitan dengan proses penafsiran, pemberian makna, dan pemahaman mendalam terhadap suatu objek, teks, data, tindakan, atau fenomena sosial.

STIA AMUNTAI

Berbeda dengan pendekatan deskriptif yang hanya memaparkan fakta di permukaan, aspek interpretatif berupaya membongkar makna tersirat, latar belakang, serta motif di balik sesuatu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membahas kompleksitas serta makna subjektif di balik suatu fenomena. Melalui penggunaan teknik observasi, wawancara, dan analisis konten, penelitian kualitatif memungkinkan penyelidikan yang lebih terperinci terhadap aspek-aspek seperti sikap, nilai, dan persepsi individu atau kelompok. Penelitian kualitatif juga memberikan ruang yang luas bagi pengembangan teori baru atau pemahaman mendalam terhadap teori yang sudah ada. Dengan memanfaatkan pendekatan induktif, peneliti dapat membahas variasi dalam pengalaman dan pandangan subjektif yang mungkin tidak dapat diukur secara langsung. Selain itu, metode ini sering kali digunakan dalam studi yang melibatkan konteks sosial dan budaya yang kompleks, di mana data kualitatif dapat membantu menggambarkan nuansa dan konteks yang tidak terdapat dalam data kuantitatif semata. (Yama P, dkk 2024:59)

Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang Implementasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Salah satu karakteristik utama dari pendekatan kualitatif adalah penggunaan teknik pengumpulan data yang fleksibel, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif individu secara lebih dalam, memberikan

kesempatan bagi responden untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka tanpa batasan yang ketat. Observasi partisipatif juga memberikan wawasan yang berharga tentang interaksi sosial dalam konteks alami. (Nurhayati dkk, 2024:24)

Penelitian ini bermaskud mendeskripsikan dan menguraikan Implementasi Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder sebagai berikut:

1. Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang deperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapet berupa dokomen-dokomen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan yang dilakukan jika informan dengan karakteristik tertentu sangat sedikit jumlahnya.

Purpossive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dilakukan adalah bertujuan

untuk memperoleh data atau informasi yang luas, rinci, dan mendalam sehingga didapat suatu kebenaran yang bermakna dan menyeluruh. Misalnya, menetapkan seseorang sebagai sampel yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu pengambilan sampel bersifat sementara dimana jumlah sampel dapat berkembang dalam penelitian, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian dan dipilih sampai kepada taraf jenuh (*redundancy*), yaitu pada saat ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi baru yang berarti (Sinaga, 2023:11-12)

Jumlah informan ada 12 orang dari pegawai/ karyawan yang ada di Kantor Kecamatan Benua Lima. Adapun jumlah informan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Pegawai/ Petugas yang menangani SIPD	4 Orang
4.	Pegawai/ Petugas kantor camat	5 orang
Jumlah		11 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pada Kantor Kecamatan Benua Lima. Maka dari itu dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Untuk lebih jelasnya mengenai desain operasional ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan George C. Edwards III dalam Igirisa (2022:66-68 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:	1. Komunikasi	a. Transmisi Komunikasi b. Kejelasan Informasi c. Konsistensi Informasi d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Kompetensi Pegawai c. Sarana dan Prasarana d. Dukungan Anggaran
	3. Disposisi	a. Komitmen Pelaksana b. Tanggung Jawab c. Kepatuhan Terhadap Prosedur d. Kemauan untuk Belajar
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Pembagian Tugas c. Fragmentasi Kewenangan d. Mekanisme Pengawasan e. Alur Kerja Birokrasi

Sumber : Diolah peneliti,2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani dkk (2020:121-149) Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboraturium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi untuk mengumpulkan data antara lain:

1. Observasi

   Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.

2. Wawancara

   Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dibuat peneliti. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

STIA AMUNTAI

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Nasution (2023:131) Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pengamatan yang dilakukan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas.

Teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti menurut Miles and Huberman dalam Nasution (2023:131-133) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjut nya membuat

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

   Penyajian data meupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan langan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantuk peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelit ian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna - makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

H. Uji Kredibilitas Data

Pada penelitian kualitatif, validitas dan kredibilitas merupakan aspek esensial yang menjamin integritas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian Berikut adalah beberapa uji kredibelitas data :

1. *Prolonged Engagement* dan *Persistent Observation*. Peneliti perlu menghabiskan waktu yang cukup di lapangan untuk membangun kepercayaan dengan partisipan, memahami budaya, serta mengidentifikasi informasi yang relevan. Prolonged engagement bertujuan mengatasi bias pribadi peneliti dan memastikan bahwa data diperoleh secara mendalam dan menyeluruh. Sedangkan persistent observation berarti melakukan pengamatan intensif terhadap aspek-aspek yang paling relevan dengan fokus penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali data dengan lebih tajam dan selektif.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

2. *Triangulasi*. Triangulasi merupakan teknik yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti untuk menguji konsistensi dan keandalan temuan.
3. *Member Checking*. Member checking atau verifikasi partisipan merupakan proses meminta partisipan untuk meninjau kembali transkrip wawancara, ringkasan data, atau interpretasi yang dibuat peneliti. Tujuannya adalah memastikan bahwa makna yang ditangkap oleh peneliti sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari partisipan. Teknik ini dianggap sebagai cara paling efektif dalam menjamin kredibilitas karena langsung melibatkan subjek penelitian.
4. *Negative Case Analysis*. Teknik ini melibatkan pencarian dan analisis data yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pola dominan. Tujuannya adalah menguji batasan dan konsistensi interpretasi. Jika setelah mempertimbangkan kasus negatif, peneliti masih dapat mempertahankan tema utama, maka kredibilitasnya akan meningkat. Proses ini mendorong peneliti untuk bersikap kritis dan tidak memaksakan pola tertentu secara sepihak. (S.Pettalongi, 2025:55-56)

STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Agustino, Leo. 2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta

Dian Suluh Kusuma Dewi. 2022. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.* Yogyakarta: Samudra Biru

Erviana, Devi 2021. *Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Di Kabupaten Nagan Raya.* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Igirissa, Irawaty, 2022. *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta:Tanah Air Beta.

Kementerian Dalam Negeri Panduan Penggunaan Sipd Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2019

Margareth Inof Riisyie Rantung, 2024. *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model)*. Tondano: Tahta Media

Mariana, Lenny. 2024. *Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi.* Stiami Jakarta, Indonesia Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnalilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

Marwiyah, Siti, 2022. *Buku Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: CV Mitra Ilmu

Nurhayati, Dkk. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik).* Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Pamungkas, Rhobi D. 2026. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Di Sektetariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025.* Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akuntansidankeuangan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta Vol:7,No1,2026,Page:1-15

Prabawati, Indah Dkk. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press

Ramadhan, Ricky. 2025. *Analisis Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS) Di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya..* Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Kelitbangan Volume 13 No

S.Pettalongi, dkk. 2025. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Teori Dan Prakti*k. Medan: PT.Media Penerbit Indonesia

Sinaga, Dameria. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).*

Jakarta: UKI Press.

Yama P, Dkk. 2024. *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI